PERSEPSI HUKUM INDONESIA TERHADAP KUDETA PARTAI POLITIK

Oleh:

Fakhira Kamila Ainurrafik, Aulia Pravasta Indrianingrum, Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Politik,
Universitas Tidar.

E-mail : kamilafakhira@gmail.com , auliapravasta3@gmail.com .

Abstrak

Hukum di Indonesia sangat berperan aktif dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada di Negara Indonesia. Partai politik adalah suatu wadah atau organisasi yang memiliki tujuan secara umum dan memiliki suatu ideologi yang terarah. Di Indonesia banyak sekali partai politik satu dengan partai politik yang memiliki visi dan misi masing-masing. Pertentangan antar partai politik sering terjadi, termasuk dengan kudeta yang marak terjadi pada saat ini. Hukum di Indonesia berpengaruh besar dengan adanya kudeta yang terjadi. Polemik yang terjadi antar partai semakin memanas. Berbagai pandangan hukum juga berperan dalam menyelesaikan kasus yang terjadi antar partai politik. Pengertian kudeta adalah menggulingkan atau merebut kekuasaan yang telah diduduki dengan cara paksa dan secara diam-diam biasanya dilakukan oleh sekumpulan kelompok yang memiliki niatan untuk mengambil kekuasaan. Secara harfiah menurut hukum bahwa perebutan kekuasaan sangat tidak dibenarkan, karena kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang pada awalnya telah dipilih secara musyawarah mufakat dan atau voting. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk memberi wawasan dan pengertian kepada masyarakat bagaimana pandangan hukum terkait dugaan kudeta yang dilakukan pada partai demokrat, dan mengenai dugaan kudeta pada partai politik yang ada di Indonesia serta agar para pembaca mengetahui dengan jelas bagaimana hukum itu bekerja dalam menjalankan tugasnya tentang kasus kudeta saat ini. Mengenai isu kudeta partai politik banyak partai yang menolak atas kudeta partai politik saat ini. Menurut pandangan Ubeddillah Badrun, kita tidak bisa menghindari dari kudeta partai politik. Kudeta partai politik menjadi fenomena yang sering terjadi dengan adanya kudeta, hal ini dapat mengganggu kehidupan partai.

Kata kunci : Partai politik, Kudeta, Hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah amandemen ketiga disahkan pada 10 November 2001. Pengeasan ketentuan konstitusi ini bermakna bahwasannya segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan nya perangkat

hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peran yang penting dalam negara hukum Indonesia.¹

Politik indonesia merupakan sebuah pembentukan dan pembagian kekuasaan.

¹ Admin Padamu, "Pengertian Negara Indonesia adalah Negara Hukum", diakses dari <https://www.padamu.net/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum>, pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 18.00.

Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial menganut sistem pemisahan kekuasaan, namun di Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan melainkan Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan. Sistem pembagian kekuasaan Indonesia yaitu terdapat legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Legislatif adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Dalam Sistem Presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menaatkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan anggaran dan pengeluaran uang lainnya. Legislatif juga kadang kala menulis perjanjian dan memutuskan perang.

Indonesia juga merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi yang berarti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi ini warga negara berhak berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan dan perumusan hukum. Salah satu contoh dari ciri-ciri sistem demokrasi adalah pemilihan umum.

Pemilihan umum legislatif dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD yang disebut dengan pileg, dan sebagainya. Pemilihan umum di Indonesia menganut sistem multipartai. Sistem multipartai berbatas dengan setiap partai yang mengikuti pemilihan umum harus memenuhi ambang batas 2,5% untuk dapat menempatkan anggota DPR.

Dalam jurnal ini kami akan membahas mengenai isu kudeta yang akan ditinjau berdasarkan pandangan hukum. Isu yang baru-baru ini terjadi dalam politik Indonesia yaitu pada awal Februari 2021 dikabarkan oleh pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa partainya akan mengalami kudeta atau “dikudeta”. Konflik internal partai dimana perebutan posisi ketua umum sudah menjadi hal yang tidak baru lagi dalam percaturan politik Indonesia. Ketua umum

memiliki posisi yang sangat strategis, tidak hanya sebagai penentu berbagai kebijakan dalam partai, tetapi juga berpeluang dicalonkan dalam pemilihan presiden.

Kudeta merupakan sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang secara ilegal dan seringkali bersifat brutal, inkonstitusional berupa pengembalian kekuasaan atau penggulingan kekuasaan sebuah pemerintahan negara dengan menyerang (strategis, taktis, politis) legitimasi pemerintahan kemudian bermaksud untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan yang digulingkan.

Partai Demokrat resmi didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI pada 10 September 2001. Partai ini memulai debutnya pada tahun 2004. Pada tahun 2004 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden. Partai Demokrat berhasil meraih peringkat ke-5 dengan suara sebanyak 7,45 persen atau 8.455.225 dari total suara dan mendapatkan 57 kursi di DPR.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membawa nama Demokrat makin dikenal setelah terpilih menjadi presiden RI ke-6 pada 2004. Dia menjadi presiden pertama Indonesia yang terpilih melalui jalur pemilu. Partai Demokrat meraih masa kejayaannya pada pemilu 2009.

Partai Demokrat berhasil menjadi pemenang Pemilu Legislatif 2009 dengan memperoleh 150 kursi (26,4) di DPR RI, setelah mendapat 21.703.137 total suara (20,4 persen).

Selanjutnya pada Pemilu 2014, jumlah perolehan suara dan perolehan kursi di DPR untuk Partai Demokrat berada di posisi keempat dari sepuluh partai di DPR. Adapun perolehan suara sebanyak 10,19 persen suara nasional atau sebanyak 12.728.913.

Kemudian pada Pemilu 2019, Partai Demokrat kembali kalah. Jumlah perolehan suara dan perolehan kursi di DPR untuk Partai Demokrat menempati posisi ketujuh

dari Sembilan partai di DPR, dengan perolehan suara sebanyak 7,77 persen suara nasional atau sebanyak 10.876.507.

Pada tahun 2013 hingga 2020 SBY dijadikan sebagai ketua umum partai Demokrat dan saat ini menjadi ketua majelis tertinggi partai Demokrat. Partai Demokrat saat ini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Dia terpilih secara aklamasi pada Kongres ke-V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020.

Masa jabatannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Masa Bakti yakni 2020-2025. SBY tidak bisa melanjutkan pemerintahan di periode ketiga, karena aturan yang muncul saat reformasi, yakni maksimal jabatan presiden hanya dua periode.

Masa senja Partai Demokrat sudah terasa sejak medio 2011, yakni saat munculnya kasus korupsi yang melibatkan Bendahara Umum Demokrat M. Nazaruddin. Kasus korupsi ini ternyata tidak berdiri sendiri. Sejumlah elite, juga bintang iklan anti korupsi Demokrat terseret. Puncak seretannya ada pada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, pada akhir 2012.

Berdasarkan survei dari Lembaga Survei Indonesia, Saiful Mujani Research and Consulting, dan Indikator, kasus korupsi inilah yang menyeret Demokrat ke posisi paling rendah sepanjang sejarahnya sebagai partai penguasa.

Tiga kali menaikkan harga bahan bakar minyak pada periode pertama memang menurunkan elektabilitas Demokrat hingga 9 persen. Namun, kasus korupsi yang merebak di periode kedua membuat elektabilitas Demokrat terjun hingga 8 persen pada Desember 2012.

Saat ini Partai Demokrat tengah mengalami gonjang-ganjing karena daanya isu kudeta partai. Bahkan Moeldoko disebut ingin rebut Demokrat demi menjadi capres 2024.

Pakar hukum tata negara Juanda meyakini bahwa polemik yang terjadi pada partai demokrat dapat diselesaikan apabila negara benar-benar menggunakan paradigma hukum.²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan dibahas adalah

1. Apa saja dampak yang dapat ditimbulkan dari kudeta dalam sebuah partai politik?
2. Bagaimana paradigma hukum Indonesia dalam menghadapi permasalahan kudeta partai politik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dari kudeta dalam sebuah partai politik.
2. Untuk mengetahui paradigma hukum Indonesia dalam menghadapi permasalahan kudeta partai politik.

D. Tinjauan Pustaka

- 1) Partai politik

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Partai politik adalah prasyarat atau kelengkapan suatu negara demokrasi. Negara demokrasi memerlukan partai

² Kompas, "Sejarah Partai Demokrat", diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/05/150500665/jadi-trending-topic-berikut-sejarah-partai-demokrat>, pada tanggal 29 Maret 2020 pukul 21.00.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

politik yang bebas, baik dalam program-program maupun kader-kadernya. Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang bertujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan politik di dalam masyarakat melalui pemilu.

Fungsi partai politik yaitu sebagai: (1) Sarana komunikasi politik. Partai politik sebagai perantara keinginan masyarakat dan kebijakan pemerintah, (2) Sarana sosialisasi politik. Partai politik menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik dalam politik, (3) Sarana rekrutmen politik. Menarik dan mengambil tenaga potensial untuk dijadikan kader politik untuk kemudian dijadikan pemimpin, (4) Sarana penengah atau pengatur konflik. Partai politik ikut memecahkan berbagai masalah yang ada di dalam masyarakat, (5) Sarana artikulasi dan agregasi kepentingan. Partai politik mengumpulkan dan merumuskan berbagai kepentingan masyarakat.

Macam-macam sistem partai yaitu: Sistem kepartaian berdasarkan jumlah, dan sistem kepartaian berdasarkan tingkat kompetisi. Sistem kepartaian berdasarkan jumlah:

- a. Sistem Tanpa Partai
- b. Sistem Partai Tunggal
(Sistem partai tunggal memiliki ciri khusus di negara tersebut hanya ada satu partai yang berkuasa. Partai tunggal ada macamnya yaitu: Partai Mutlak dan partai Dominasi.)
- c. Sistem Dwi-Partai.
(Memiliki ciri khusus dua partai besar yang bertarung untuk kekuasaan politik. Dua partai tersebut yaitu: Partai Berkuasa (partai yang menang), dan Partai Oposisi (partai yang kalah.))
- d. Sistem Multi Partai.
(Memiliki ciri khusus lebih dari dua partai. Pada sistem ini terdapat banyak partai.)

Sedangkan sistem kepartaian berdasarkan tingkat kompetisi:

- a. Monolithic party systems

- b. Dominant party systems
- c. Hegemonic party systems
- d. Competitive party systems.

Kategori dalam partai politik terdapat Partai kader yang lebih mementingkan kualitas anggota, dan Partai masa yang lebih mementingkan kuantitas anggota.

Aspek-aspek penting dalam sistem kepartaian adalah jumlah partai politik yang berdiri serta jumlah partai yang berfungsi secara efektif, kemudahan pembentukan dan pembubaran partai politik, tingkat fragmentasi kekuatan antar-partai politik, tingkat kompetisi antar-partai, tingkat kemampuan partai memelihara dukungan pemilih dan mengelola konstituen, dan praktik demokrasi dalam partai.

Perbedaan indikator Partai Tradisional dan Partai Modern yaitu Partai Tradisional memiliki ideologi tertutup, cara kerjanya oligarki-sentralistik, kepemimpinan personal-personal, manajemen konflik personal-tertutup, basis dukungan organisasi *underbouw* elite, pendualangan dukungan negosiasi elitis dan kampanye sesaat, pemosisian calon pemilih khalayak positif pasif, dan fungsi partai minimal. Sedangkan Partai Modern memiliki ideologi terbuka, cara kerjanya demokratis-desentralistik, kepemimpinan institusional-kolektif, manajemen konflik institusional-terbuka, basis dukungan kelompok kepentingan transaksional konstituen, pendulangan dukungan pemasaran politik dan pemasaran sepanjang masa, pemosisian calon pemilih konsumen politik aktif, dan fungsi partai maksimal.⁴

2) Kudeta

⁴ Cecep Hidayat, "Partai Politik", diakses dari https://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/121/mod_resource/content/0/OCW%202013%20-%20PIP%2009%20Partai%20Politik.pdf, pada tanggal 7 April 2021 pukul 22.16.

Kudeta berasal dari Bahasa Perancis *Coup d'état* atau *coupyang* berarti pukulan terhadap suatu negara (*a sudden blow or strike to a state*). Menurut KBBI, kudeta adalah perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa. Mengudeta adalah melakukan perebutan kekuasaan dengan paksa dan tidak secara sah.

Prasyarat utama kudeta adalah kendali atas semua atau sebagian angkatan bersenjata, polisi, dan elemen militer lainnya. Secara informal, istilah kudeta terkadang digunakan untuk merujuk pada pengambil alihan atau kemenangan bukan hanya di bidang pemerintahan tetapi juga di perusahaan.⁵

3) Hukum

Prof. Mr. E.M. Meyers dalam bukunya “De Algemene begrippen van het Burgerlijk Recht”: “Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi Penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya”.

Leon Duguit berpendapat: “Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan Bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi Bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu”.

Immanuel Kant berpendapat: “Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain,

menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan”.⁶

Indonesia adalah negara yang menganut hukum sebagai landasan dasar dalam menjalankan semua tugas, kewenangan serta aturan yang ada di dalamnya. Sebutan Indonesia adalah negara hukum telah tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Maksud dari negara hukum adalah negara yang semua spek peraturannya mempunyai sifat yang memaksa apabila peraturan tersebut dilanggar maka akan dikenai sanksi yang memberatkan agar pelanggar merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Arti lain Indonesia sebagai Negara Hukum ialah dalam kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia segala aspek-aspek yang mengatur Negara Indonesia harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan berpedoman pada produk hukum Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945 atau perundang-undangan lainnya yang telah berlaku di wilayah NKRI.

Perundang-undangan yang mengatur NKRI seperti peraturan presiden, menteri, peraturan daerah, peraturan yang diturunkan oleh gubernur, peraturan yang diturunkan oleh bupati setempat dan peraturan lainnya.

Hukum harus bersifat adil, Indonesia yang menganut negara hukum juga harus menegakkan keadilan dan nilai-nilai moral seperti terkandung di dalam dasar negara kita yaitu Pancasila.⁷

METODE PENELITIAN

⁶ Drs. C.S.T. Kansil, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1989), hlm. 36

⁷ Berita Hari Ini, “Pengertian Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, diakses dari <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum-1uhFyeet28m/full>, pada 10 April 2021 pukul 19.08.

⁵ Kompas, “Apa itu Kudeta?”, diakses dari https://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/121/mod_resource/content/0/OCW%202013%20-%20PIP%2009%20Partai%20Politik.pdf, pada tanggal 7 April 2021 pukul 22.32.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat normatif – empiris. Dalam penelitian normatif – empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normative dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian yang digunakan normatif – empiris dengan kategori *Judicial Case Study*.

B. Cara Penelitian

Cara penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai dari membahas dan mengangkat suatu permasalahan atau kasus yang sedang terjadi kemudian mencari tahu kesalahan dari permasalahan itu di mata masyarakat atau orang awam pada umumnya, dilanjutkan dengan mencari tahu data dan menganalisis tentang kasus tersebut, dan yang terakhir menjelaskan secara rinci tentang kasus yang menjadi pertanyaan masyarakat pada umumnya menurut pandangan dari kami.

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sendiri adalah suatu metode penelitian yang mengedepankan analisis dan deskriptif yang mana mengedepankan dari data dan penjelasan seseorang.

Metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk memahami dan memahami suatu gejala-gejala sentral. Untuk memahami gejala tersebut, peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi kemudian dikumpulkan yang berupa kata maupun teks. Kumpulan informasi tersebut kemudian dianalisis. Dari hasil analisis peneliti kemudian menjabarkan penelitian ilmuwan-ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya. Hasil akhir penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Penelitian ini lebih condong kepada

penelitian kualitatif normatif – empiris yang mana dalam penelitian ini tentu masih mengedepankan metode kualitatif yang berdasarkan analisis dan deskriptif dan ditambah dengan metode normatif – empiris yaitu menggunakan undang-undang sebagai dasar dari penyelesaiannya dan sumber hukum yang harus digunakan atau diterapkan kepada masyarakat yang berada dibawah lingkup hukum yang sedang berlaku.

Tujuan jurnal ini menggunakan metode kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu kasus secara mendalam dan dapat memperluas wawasan sedalam-dalamnya bagi kami sebagai penulis serta untuk para pembaca, selain itu tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengupas secara mendalam mengenai kedetailan suatu kasus yang sedang kami teliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak yang ditimbulkan kudeta dalam partai politik.

Tak sedikit dari partai politik yang akhirnya terpecah belah karena perbedaan pandangan. Contoh dugaan kasus kudeta partai politik yang baru-baru ini adalah partai demokrat.

Dugaan kudeta tersebut disinyalir terjadi karena ada anggota yang menunjukkan ketidakpuasan atas kinerja Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Moeldoko dan beberapa fraksi Demokrat melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang pada Jum'at, 5 Maret 2021.

Konflik internal dalam partai demokrat bisa dibilang paling baru, namun kejadian konflik internal pada partai ini bukanlah yang pertama. Sejak era kepemimpinan Soekarno, Indonesia sudah mengalami pasang surutnya intrik dalam partai politik.

a. Sarekat Islam (SI): SI Merah Vs SI Putih.

Sarekat Islam (SI) berawal dari Sarekat Dagang Islam (SDI) mulanya merupakan kumpulan para pedang pribumi. Dibentuk pada tahun 1905, kelompok ini dibuat sebagai perlawanan pedagang pribumi terhadap kondisi pasar yang saat itu dikuasai pedagang Tionghoa.

Seiring berkembang pesatnya SI, secara perlahan kelompoknya mulai disusupi dengan paham sosialisme revolusioner mulai tahun 1914. Paham ini dibawa oleh H.J.F.M Sneevliet lewat organisasinya yang bernama ISDV (Indische Sociaal-Democratische Vereeniging).

Memiliki tujuan serupa untuk membantu rakyat kecil dan melawan kapitalisme, beberapa tokoh muda seperti Semaoen, Darsono, Tan Malaka, dan Alimin Prawirodirdjo pun ikut menganut paham ini.

SI melaksanakan kongres keenamnya pada 6-10 Oktober 1921 untuk membahas pelarangan rangkap keanggotaan dalam tubuh partai. Hal ini dilakukan setelah mendapat desakan dari Abdul Muis dan Agus Salim yang ingin membersihkan SI dari unsur-unsur komunis.

Sejak saat itu, SI pun terpecah menjadi dua pihak. SI Merah berpusat di Semarang dan SI Putih berpusat di Yogyakarta. SI Putih dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto dan SI Merah yang menganut paham Komunisme-Sosialisme dipimpin oleh Semaoen.

b. Partai Demokrasi

Perpecahan dalam partai berlambang kepala banteng menjadi salah satu momen kelam dalam dunia politik Indonesia.

Kejadian ini bermula ketika terdapat 16 fungsionaris DPP PDI yang melaksanakan kongres untuk memisahkan diri dari Megawati Soekarno Putri. Proses pelaksanaan kongres tersebut bertempat di

Medan yang dipimpin oleh Fatimah Achmad.

Megawati pun langsung melayangkan respon keras dengan memecat ke-16 fungsionaris itu. Pemecatan ini dilakukan karena mereka dianggap membelot dan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) PDI.

Meski mendapat tantangan keras dari pihak partai, nyatanya kongres ini tetap berjalan dan disinyalir mendapat dukungan dari Soeharto. Dugaan ini mendapat dasar kuat setelah kongres pada 20-22 Juni 1996 ini dibuka oleh sambutan Menteri Dalam Negeri saat itu, Yogie S. Memed.

Kongres tersebut berjalan lancar dan berujung pada penunjukan Wakil Ketua DPR/MPR Soerdjadi sebagai ketua umum baru PDI. Konflik ini akhirnya semakin memanas dan berujung maut.

c. Partai Kebangkitan vangsa (PKB): Gus Dur vs Cak Imin.

Sama halnya dengan Demokrat, PKB juga pernah mengalami kasus serupa menjelang Pemilu 2009. Perpecahan ini bermula ketika alm. Abdurahman Wahid (Gus Dur) yang menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB saat itu, mencopot Muhaimin Iskandar dari jabatannya sebagai ketua umum PKB. Keputusan tersebut diambil Gus Dur setelah mencium maneuver-manuver Cak Imin yang terkesan membelot darinya.

Tak terima dicopot, Cak Imin menggugat balik Gus Dur ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Muktamar Luar Biasa (MLB) pun mulai ramai disuarakan untuk digelar oleh para anggotanya.

Setelah beragam desakan, akhirnya MLB pun dilaksanakan. Namun, nyatanya MLB sama-sama dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Anggota PKB yang mengikuti Gus Dur melaksanakan MLB

di Ponpes Al-Asshriyyah, Bogor. Sedangkan yang mengikuti Cak Imin melaksanakannya di Hotel Mercure, Ancol.

Kepurtusan akhir MLB yang digelar Gus Dur menetaokan dirinya sebagai Ketua Umum Dewan Syuro dan Ali Masykur Musa sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz. Sedangkan MLB Cak Imin menetapkan dirinya sebagai Ketua Umum PKB dan KH Aziz Mansyur sebagai Ketua Umum Dewan Syuro.

- d. Golkar: Aburizal Bakrie vs Agung Laksono.

Golkar juga tak lepas dari dualism dalam tubuh partainya. Tercatat di tahun 2014, partai pohon beringin ini sempat mengalami dualism kepengurusan. Kejadian ini bermula ketika musyawarah nasional (munas) Golkar di Bali, dianggap tidak demokratis.

Hal ini bermula ketika Airlangga Hartanto dan Hajriyanto mengundurkan diri dari bursa calon Ketua Umum Partai Golkar. Membuat musyawarah nasional Bali berakhir dengan terpilihnya Aburidzal Bakrie sebagai Ketua Umum baru Partai Golkar.

Pada Maret 2015, Pemerintah lewat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memutuskan hasil musyawarah nasional Ancol yang disetujui legalitasnya. Keputusan ini diduga muncul karena Agung Laksono memihak pada pemerintahan Jokowi sedangkan Ical bertindak sebagai oposisi.

Setelah intrik dan perdebatan yang Panjang, akhirnya dualism ini berhasil diakhiri pada 2016. Kedua belah pihak setuju untuk mengatur Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Mei 2016.

Tak seperti pemilihan sebelumnya, kali ini Agung dan Ical justru tidak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar yang baru. Munaslub ini

menghasilkan putusan akhir yang menunjuk Setya Novanto menjadi Ketua Umum baru partai Golkar Periode 2016-2019.

- e. Partai Persatuan Pembangunan (PPP); Djan Faridz vs Romahurmuzy (Romy).

PPP mengalami kisruh dualisme setelah Suryadhrana Ali ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi penyelenggaraan haji pada tahun 2014.

Romahurmuzy yang waktu itu menduduki jabatan sekretaris jenderal di PPP memutuskan untuk memecat Ali dari jabatannya. Ditangkapnya Ali meninggalkan kekosongan pada posisi Ketua Umum partai. Maka dari itu, pengurus partai pun setuju untuk melaksanakan muktamar. Bukannya berkumpul menjadi satu wadah, PPP malah melaksanakan muktamar di Surabaya dan Jakarta.

Muktamar di Surabaya diinisiasi oleh Romi dan berakhir dengan ditunjuknya Romi sebagai Ketua Umum PPP yang baru. Sedangkan Muktamar Jakarta, diinisiasi pendukung Ali dan menunjuk Djan sebagai ketuanya.

Ditunjuknya Romi sebagai ketua langsung mendapatkan surat keputusan resmi dari pemerintah. Meskipun begitu Djan tidak menyerah dan terus menggugat keputusan itu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Selama hampir 3 tahun, kedua kubu itu terus beradu memperebutkan keabsahan diri mereka sebagai Ketua Umum PPP. Hingga akhirnya setelah menerima peninjauan kembali oleh Makamah Agung (MA) di tahun 2017, Romi meyakinkan bahwa kini PPP sudah bersatu kembali.

- f. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura): Oesman Sapta Odang (OSO) vs Marsekal Madya (Purn) Daryatmo.

Sama halnya dengan yang terjadi pada PKB, dualism ini bermula dari aksi

saling pecat yang dilakukan oleh Sekjen DPP Hanura Syarifuddin Sudding dan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) di tahun 2018.

Sudding memecat OSO karena menganggapnya melanggar peraturan partai. Di hari yang sama OSO balik memecat Sudding yang dianggapnya tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Sudding Bersama kubunya di Hanura menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslab) yang merupakan perintah dari Wiranto. Munaslab yang dilaksanakan di Cilangkap ini menghasilkan putusan penunjukan Daryatmo sebagai Ketua baru Hanura.

OSO pun tidak terima dengan keputusan tersebut. Ia masih merasa ketua yang resmi, merasa keputusannya memecat Sudding sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang restrukturisasi, reposisi, dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti 2015-2020 nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018.⁸

Dari kasus-kasus diatas dapat kita jabarkan bahwa dampak dari kudeta partai politik adalah perpecahan, dan dampak yang paling tidak diinginkan adalah terjadinya pertumpahan darah.

Dalam kasus dugaan kudeta partai demokrat terpecah menjadi dua kubu, yakni dibawah naungan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan versi hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang. Atau pimpinan Moeldoko.

Dugaan kasus kudeta partai demokrat membawa dampak bagi Agus Harimurti Yudhoyono dan demokrat.

Popularitas dan favorabilitas Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Partai Demokrat kini menjelit. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Demokrat, yakni Tomi Satryatomo dalam diskusi Proklamasi Democracy Forum bertajuk “Prahara Hostile Take Over Partai Politik Dalam Arena Demokrasi’ secara virtual.

Tomi menguraikan, periode pertama dilakukan 7 hari sebelum AHY memberikan keterangan pers soal adanya upaya kudeta Partai Demokrat dari 24 Januari sampai 30 Januari. Pada waktu itu, popularitas Partai Demokrat berada pada urutan ketiga.

Namun pada tanggal 31 Januari sampai 6 Februari popularitasnya jauh diatas tujuh puluh ribu dan favorabilitasnya pun naik jauh dari partai-partai lain. Partai Demokrat menjadi populer dan pada saat yang bersamaan orang-orang menyukai Partai Demokrat, dari segi popularitas dan favorabilitas baik dalam pemberitaan maupun percakapan.

Sementara, popularitas Moeldoko sebagai pihak eksternal yang diduga terlibat kudeta Partai Demokrat berada di posisi paling bawah. Namun Kepala Staf Kepresidenan itu memiliki favorabilitas yang rendah dibanding AHY.⁹

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia menilai, adanya kabar dugaan kudeta yang diumumkan Partai Demokrat menjadi strategi yang cukup cerdas. Menurutnya ada dua hal yang dimanfaatkan Partai Demokrat dalam momen isu kudeta ini.

⁸ Okenews, “Kudeta di Partai Politik dari Orde Lama hingga Era Reformasi”, diakses dari <https://nasional.okezone.com/read/2021/03/11/337/2375946/kudeta-di-partai-politik-dari-orde-lama-hingga-era-reformasi>, pada tanggal 7 April 2021 pukul 21.20.

⁹ Tribun Timur, “Inilah Dampak Kasus Kudeta yang Harus ‘Ditanggung’ AHY ann Demokrat, Diungkap Orang Dekat, Moeldoko?”, diakses dari <https://nasional.okezone.com/read/2021/03/11/337/2375946/kudeta-di-partai-politik-dari-orde-lama-hingga-era-reformasi>, pada tanggal 7 April 2021 pukul 22.45.

Pertama, Demokrat bisa konsolidasi partai di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Kedua, Partai Demokrat meraih efek relasi public. Karena dengan adanya isu kudeta tersebut, Partai Demokrat pertama kalinya berhadapan dengan istana dengan cukup tegas. Dengan begitu Partai Demokrat bisa memperoleh efek elektoral dari pihak-pihak yang selama ini oposisi terhadap pemerintah.¹⁰

dalam penyelesaiannya benar-benar menggunakan paradigma hukum¹¹

B. Menurut paradigma hukum di Indonesia mengenai Kudeta Partai Politik.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam), yakni Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah akan menggunakan pendekatan hukum dalam menyelesaikan polemik KLB kubu kontra AHY.

Pendekatan tersebut dapat diterapkan apabila KLB kubu kontra AHY melaporkan hasil kegiatannya kepada Kemenumham. Dalam keterangannya Mahfud mengatakan: “Untuk kasus KLB atau klaim KLB Partai Demokrat di Deli Serdang itu, pemerintah akan menyelesaikan berdasarkan hukum.”

Dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut, pemerintah akan melakukan dua skenario pendekatan hukum. Pertama, Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Kedua, pendekatan berdasarkan AD/ART yang tercatat kali terakhir diterima Kemenkumham pada 2020.

Menurut pakar hukum tata negara Juanda meyakini polemik yang melanda Partai Demokrat dapat berakhir apabila

¹⁰ Muhammad Genatan Saputra, “Isu Kudeta AHY Bisa Mendatangkan Efek Elektoral untuk Demokrat?”, diakses dari <https://www.merdeka.com/politik/isu-kudeta-ahy-bisa-mendatangkan-efek-elektoral-untuk-demokrat.html>, pada tanggal 7 April 2021 pukul 22.46.

¹¹ Kristian Erdianto, “Bagaimana Sikap Pemerintah Merespons Kudeta di Partai Demokrat?”, diakses dari <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/bagaimana-sikap-pemerintah-merespons-kudeta-di-partai-demokrat/ar-BB1eluFj>, pada tanggal 12 April 18.29.

1) Undang-undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Pasal 32 ayat (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD ART. (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada kementerian. (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari. (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Pasal 33 ayat (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.¹²

2) AD ART Partai Demokrat

Bab III tentang Keanggotaan Partai
Pasal 11 tentang Anggota Ayat (1) Setiap warga negara Indonesia yang

telah memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diterima menjadi anggota Partai Demokrat. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17 tentang Ketua Umum Ayat (1): “Ketua umum dipilih melalui kongres.” (2) Ketua Umum bertugas melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan semua kegiatan kepartaian, baik ke dalam maupun ke luar. (3) dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Umum dibantu Wakil Ketua Umum I, Wakil Ketua Umum II, Sekertaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekertaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Direktur Eksekutif, serta alat kelengkapan partai. (4) Ketua Umum secara *ex-officio* adalah Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai dan Wakil Ketua Dewan Kehormatan.

Bab VIII tentang Jangka Waktu Kepengurusan Pasal 99 tentang Jangka Waktu Kepengurusan Ayat (1) Jangka waktu kepengurusan partai pada semua tingkatan adalah 5 (lima) tahun. (2) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jangka waktu kepengurusan dapat kurang dari 5 (lima) tahun, apabila dilakukan melalui Kongres Luar Biasa, Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa, Musyawarah Ranting Luar Biasa. (3) Dalam hal jangka waktu kepengurusan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dilaksanakan maka kepengurusan partai akan dipimpin oleh Pelaksana Tugas. (4) Tata cara, persyaratan, pengangkatan, dan hal-hal lain tentang Jangka Waktu Kepengurusan dan Pelaksana Tugas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Bab IX tentang Kongres, Musyawarah, dan Rapat-rapat Pasal 100 tentang Kongres dan Kongres Luar Biasa Ayat (1) Kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

sekali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang:

- a. menetapkan Ketua Dewan Pembina;
- b. mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- c. menetapkan Program Umum Partai;
- d. meminta dan meilai Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pimpinab Pusat;
- e. memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Formatur Kongres; dan
- f. menetapkan keputusan-keputusan Kongres lainnya.

Ayat (2) Kongres Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan Kongres. (3) Kongres Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan:

- a. Majelis Tinggi Partai, atau
- b. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang.

Ayat (4) Dalam permintaan tersebut, harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan diadakannya Kongres Luar Biasa. (5) Dewan Pimpinan Pusat sebagai penyelenggara Kongres Luar Biasa.¹³

3) Keputusan Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM menolak permohonan pengesahan pengurusan Partai Demokrat versi Ketua Umum Moeldoko. Sebelumnya Moeldoko dipilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat berdasarkan Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatra Utara 5 Maret 2021 lalu.

Partai Demokrat versi KLB tersebut telah mengajukan permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) dan

pengurusan ke Kemenkumham. Menteri Hukum dan HAM, yakni Yasonna Laoly dalam konferensi pers, pada hari Rabu, 31 Maret 2021 mengatakan “Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang Sumatra Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak.”

Yasonna menyebut bahwa keputusan tersebut menggunakan AD/ART yang terdaftar pada tahun 2020 lalu. Dimana saat itu Partai Demokrat telah memilih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum.

Pada AD/ART yang terdaftar disebutkan syarat mengadakan KLB memerlukan persetujuan dari 2/3 Dewan Pengurus Daerah (DPD), 1/2 Dewan Pengurus Cabang (DPC), dan disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi. Berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh pengurus Partai Demokrat versi Moeldoko, hal tersebut tidak terpenuhi.

Yasonna menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain perwakilan DPD, DPC tidak disertai mandat dari ketua DPD DPC.

Yasonna menyebut AD/ART tersebut telah disahkan oleh Kemenkumham pada tahun 2020 lalu. Apabila terdapat ketidaksetujuan, terdapat opsi mengajukan gugatan terkait AD/ART tersebut ke pengadilan.¹⁴

¹³ DPP Partai Demokrat 2010 tentang AD/ART Partai Demokrat.

¹⁴ Abdul Basith Bardan, “Kemenkumham tolak pengurus Partai Demokrat versi Moeldoko”, diakses dari <https://amp.kontan.co.id/news/kemenkumham-tolak-pengurus-partai-demokrat-versi-moeldoko> pada tanggal 12 April 2021 pukul 18.46.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kami, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan kudeta yang terjadi saat ini sangat bertentangan dengan keputusan keputusan hukum yang berlaku pada masa ini. Kudeta tidak hanya dilakukan baru baru ini melainkan pada zaman sebelumnya sudah adanya suatu kudeta sebagai contoh dalam serekat islam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan hasil dari pembahasan juga disimpulkan bahwa banyak dampak dari kudeta partai politik. Partai politik adalah suatu organisasi yang menjalankan suatu ideologi dan memiliki tujuan umum, dalam hal ini partai politik memiliki peranan penting dan ikut andil dalam pembentukan negara. Kudeta partai demokrat tersebut menuai banyak titik tolak dari partai partai lain seperti partai golkar yang menolak adanya kudeta di dalam suatu kepemimpinan partai. sesuai dengan asas demokrasi dalam memilih pemimpin suatu kelompok harus menggunakan metode musyawarah mufakat atau menggunakan metode votting. Tidka bisa dipungkiri bahwa kasus kudeta partai politik yang sedang terjadi pada partai demokrat menuai tanya, apakah adanya nepotisme didalamnya. Terdapat pada undang-undang mengenai partai politik bahwa penyerahan kekuasaan juga telah diatur didalamnya melalui kongres – kongres dan dipilih berdasarkan kesepakatan bersama serta apabila adanya perselisihan maka dibawa ke pengadilan negeri dan diputuskan ke Mahkamah Agung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Persepsi Hukum Indonesia Terhadap Kudeta Partai Politik”, peneliti memberikan saran kepada pihak – pihak yang terkait mengenai permasalahan kudeta partai politik yang terjadi, antara lain :

1. Dengan adanya kudeta partai politik yang terjadi pada partai demokrat sebaiknya partai demokrat melakukan konsolidasi internal atau penguatan partai agar partai

demokrat lebih solid dalam menjalankan kepengurusan partai.

2. Partai demokrat juga harus melakukan kompromi dengan semua anggota internal partai agar menciptakan demokrasi dalam partai yang kuat dan melahirkan partai politik yang kuat dan tidak terjadinya ego yang bertentangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Drs. C.S.T. Kansil, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*(Jakarta: PN Balai Pustaka, 1989), hlm. 36
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- DPP Partai Demokrat 2010 tentang AD/ART Partai Demokrat.
- Berita Hari Ini, “Pengertian Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, diakses dari <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum-1uhFyeet28m/full>, pada 10 April 2021 pukul 19.08.
- Okenews, “Kudeta di Partai Politik dari Orde Lama hingga Era Reformasi”, diakses dari <https://nasional.okezone.com/read/2021/03/11/337/2375946/kudeta-di-partai-politik-dari-orde-lama-hingga-era->

[reformasi](#), pada tanggal 7 April 2021 pukul 21.20.

[hukum](#), pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 18.00.

Tribun Timur, “Inilah Dampak Kasus Kudeta yang Harus ‘Ditanggung’ AHY ann Demokrat, Diungkap Orang Dekat, Moeldoko?”, diakses dari <https://nasional.okezone.com/read/2021/03/11/337/2375946/kudeta-di-partai-politik-dari-orde-lama-hingga-era-reformasi>, pada tanggal 7 April 2021 pukul 22.45.

Kompas, “Sejarah Partai Demokrat”, diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/05/150500665/jadi-trending-topic-berikut-sejarah-partai-demokrat>, pada tanggal 29 Maret 2020 pukul 21.00.

Muhammad Genatan Saputra, “Isu Kudeta AHY Bisa Mendatangkan Efek Elektoral untuk Demokrat?”, diakses dari <https://www.merdeka.com/politik/isu-kudeta-ahy-bisa-m mendatangkan-efek-elektoral-untuk-demokrat.html>, pada tanggal 7 April 2021 pukul 22.46.

Cecep Hidayat, “Partai Politik”, diakses dari https://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/121/mod_resource/content/0/OCW%202013%20-%20PIP%2009%20Partai%20Politik.pdf, pada tanggal 7 April 2021 pukul 22.16.

Kristian Erdianto, “Bagaimana Sikap Pemerintah Merespons Kudeta di Partai Demokrat?”, diakses dari <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/bagaimana-sikap-pemerintah-merespons-kudeta-di-partai-demokrat/ar-BB1eluFj>, pada tanggal 12 April 18.29.

Kompas, “Apa itu Kudeta?”, diakses dari https://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/121/mod_resource/content/0/OCW%202013%20-%20PIP%2009%20Partai%20Politik.pdf, pada tanggal 7 April 2021 pukul 22.32.

Abdul Basith Bardan, “Kemenkumham tolak pengurus Partai Demokrat versi Moeldoko”, diakses dari <https://amp.kontan.co.id/news/kemenkumham-tolak-pengurus-partai-demokrat-versi-moeldoko>” pada tanggal 12 April 2021 pukul 18.46.

Admin Padamu, “Pengertian Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, diakses dari <https://www.padamu.net/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara->